

# Indonesia di Tengah Rivalitas Kekuatan Besar:

Strategi Bebas-Aktif dalam Dunia Multipolar



Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Indonesia di Tengah Rivalitas Kekuatan Besar:  
Strategi Bebas-Aktif dalam Dunia Multipolar*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan  
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyct75@gmail.com](mailto:rudyct75@gmail.com)

12 Maret 2026

## **INDONESIA DI TENGAH RIVALITAS KEKUATAN BESAR: STRATEGI BEBAS-AKTIF DALAM DUNIA MULTIPOLAR**

### **Pendahuluan**

Indonesia memasuki dekade 2020-an dalam sebuah lingkungan internasional yang tidak lagi nyaman dijelaskan dengan bahasa Perang Dingin. Dunia kini bukan bipolar klasik, tetapi juga belum menjadi tatanan yang stabil. Yang tampak justru adalah kombinasi antara persaingan Amerika Serikat–Tiongkok, bangkitnya forum-forum Global South seperti BRICS, tumbuhnya minilateralisme keamanan di Indo-Pasifik, perang di Timur Tengah yang mengguncang energi dan pasar, serta tekanan geoekonomi yang makin langsung terasa sampai ke fiskal dan nilai tukar negara berkembang. Dalam konteks itu, pertanyaan tentang posisi Indonesia menjadi sangat penting: apakah “bebas-aktif” masih memadai, atau perlu ditafsir ulang agar sesuai dengan dunia multipolar yang lebih cair, lebih transaksional, dan lebih berisiko?

[\(Reuters\)](#)

Jawaban singkatnya adalah bahwa politik luar negeri bebas-aktif bukan warisan usang, melainkan kerangka yang justru semakin relevan. Namun relevansi itu tidak datang otomatis. Ia harus diterjemahkan menjadi strategi yang mampu menjaga kedaulatan, memperluas ruang gerak ekonomi, mengelola hubungan dengan semua kekuatan besar, dan pada saat yang sama mencegah Indonesia terseret ke dalam blok atau konflik yang bukan kepentingannya. Presiden Prabowo pada 9 Maret 2026 menegaskan bahwa Indonesia tetap berada di jalur “bebas aktif,

nonblok” dan “tidak ingin ikut blok mana pun,” sementara pada Juni 2025 ia juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mempertahankan kebijakan non-blok. Pernyataan itu penting, tetapi tantangan sesungguhnya terletak pada implementasinya di tengah tekanan yang makin kompleks. ([Setneg](#))

Makalah ini berargumen bahwa dalam dunia multipolar, strategi bebas-aktif Indonesia tidak dapat dipahami sebagai sikap netral pasif atau sekadar menjaga jarak yang sama dari semua pihak. Yang dibutuhkan adalah bebas-aktif yang lebih strategis: nonblok secara prinsip, tetapi sangat aktif dalam memperluas jejaring ekonomi, membangun kapasitas pertahanan, memanfaatkan forum multilateral, dan melakukan *issue-based alignment* tanpa berubah menjadi anggota blok militer. Dalam praktiknya, hal ini sudah mulai tampak melalui langkah Indonesia yang sekaligus memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, memperdalam hubungan ekonomi dengan Tiongkok, maju dalam CEPA dengan Uni Eropa, membangun kemitraan dengan Rusia, bergabung dengan BRICS dan New Development Bank, serta memperkuat kerja sama keamanan dengan Australia, bahkan ke arah format yang melibatkan Jepang dan Papua Nugini. ([Reuters](#))

## **1. Dunia Multipolar dan Perubahan Makna Persaingan Kekuatan Besar**

Dunia multipolar bukan sekadar dunia dengan lebih banyak kekuatan besar. Ia adalah dunia di mana kekuatan tersebar ke banyak poros, tetapi institusi penahannya tidak selalu sekuat tantangannya. Persaingan strategis kini berlangsung simultan di bidang maritim, teknologi, mineral kritis, data, energi, logistik, dan keuangan. Karena itu, rivalitas kekuatan besar tidak lagi muncul hanya dalam bentuk perang langsung, melainkan dalam tarif, rantai pasok, sanksi, standar digital, dan persaingan investasi. Indonesia merasakan ini secara langsung: pada Februari 2026 Jakarta dan Washington menyelesaikan perjanjian dagang

yang menurunkan tarif AS atas ekspor Indonesia dari 32% menjadi 19%, tetapi perjanjian itu juga memuat implikasi besar pada mineral kritis, investasi, dan perdagangan digital. ([Reuters](#))

Pada saat yang sama, Tiongkok tetap merupakan mitra ekonomi paling penting bagi Indonesia. Data BPS untuk Januari–Oktober 2025 menunjukkan Tiongkok adalah pasar ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan nilai USD 52,45 miliar atau 23,51% dari total ekspor nonmigas, sekaligus sumber impor nonmigas terbesar sebesar USD 70,19 miliar atau 40,90%. Reuters juga melaporkan bahwa Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia, sementara Menlu Sugiono pada April 2025 menegaskan bahwa hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan Amerika Serikat sama-sama penting. Dengan demikian, rivalitas kekuatan besar bagi Indonesia bukanlah soal memilih satu kubu, melainkan soal mengelola ketergantungan yang tidak simetris terhadap beberapa pusat kekuatan sekaligus. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Inilah yang membedakan tantangan Indonesia hari ini dari masa lampau. Pada era bipolar, garis pemisah relatif jelas. Pada era multipolar, Indonesia justru menghadapi risiko *overexposure*: terlalu tergantung pada satu pasar, satu sumber pembiayaan, atau satu payung keamanan akan mempersempit otonomi strategis. Karena itu, bebas-aktif dalam dunia multipolar harus dibaca sebagai strategi untuk menjaga ruang manuver. Ia bukan hanya etika diplomasi, tetapi alat untuk menghindari penangkapan kebijakan oleh kekuatan eksternal. Fakta bahwa Indonesia kini bergerak di begitu banyak kanal sekaligus menunjukkan bahwa elite strategis Indonesia membaca dunia bukan sebagai arena hitam-putih, tetapi sebagai ruang kontestasi yang memerlukan fleksibilitas tinggi. ([Reuters](#))

## **2. Bebas-Aktif: Bukan Netralitas Pasif, Melainkan Otonomi Strategis**

Dalam diskursus publik, bebas-aktif sering direduksi menjadi “tidak memihak siapa pun.” Padahal, inti bebas-aktif jauh lebih dalam. “Bebas”

berarti Indonesia tidak membiarkan kebijakan luar negerinya didikte oleh blok atau kekuatan eksternal; "aktif" berarti Indonesia tidak bersikap apatis, tetapi ikut membentuk lingkungan regional dan global agar lebih sesuai dengan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Pernyataan Presiden Prabowo pada Maret 2026 bahwa Indonesia "menghormati semua kekuatan" tetapi "tidak ingin ikut blok mana pun" selaras dengan penegasan sebelumnya di SPIEF 2025 bahwa Indonesia akan terus mempertahankan kebijakan non-blok. Ini menegaskan kontinuitas prinsip, sekaligus memberi dasar politik bagi strategi yang lentur tetapi tidak oportunistik. ([Setneg](#))

Karena itu, bebas-aktif bukanlah sinonim dari mengambil jarak yang sama dalam semua isu. Dalam banyak hal, Indonesia justru harus dekat dengan berbagai pihak secara berbeda-beda. Dengan Amerika Serikat, Indonesia membutuhkan pasar, investasi, teknologi, dan kerja sama mineral kritis. Dengan Tiongkok, Indonesia membutuhkan perdagangan, industri, infrastruktur, dan stabilitas ekonomi kawasan. Dengan Uni Eropa, Indonesia membutuhkan diversifikasi pasar dan legitimasi standar perdagangan hijau yang lebih adil. Dengan Rusia, Indonesia membutuhkan kanal energi, pangan, dan ruang diplomasi yang memperluas opsi. Dengan BRICS dan NDB, Indonesia membutuhkan akses pembiayaan dan panggung reformasi tata kelola global. Artinya, bebas-aktif yang efektif bukan equidistance mekanis, melainkan *multi-engagement* yang dipandu kepentingan nasional. ([Reuters](#))

Di sinilah konsep "otonomi strategis" menjadi penting. Indonesia tidak akan pernah memiliki kekuatan militer atau ekonomi sebesar Amerika Serikat maupun Tiongkok. Namun Indonesia dapat membangun kemampuan untuk tidak mudah dipaksa memilih. Otonomi strategis lahir dari kombinasi beberapa hal: diversifikasi mitra, ketahanan ekonomi domestik, kapasitas pertahanan minimum yang kredibel, kepemimpinan regional, dan kemampuan menawarkan diri sebagai jembatan. Semua elemen ini secara bertahap tampak dalam perilaku Indonesia belakangan

ini, meskipun konsolidasi institusionalnya belum selalu sekuat ambisi politiknya. ([ASEAN](#))

### **3. Mengapa Indonesia Penting dalam Dunia Multipolar**

Indonesia penting bukan hanya karena ukurannya, tetapi karena posisinya di persilangan geopolitik dan geoekonomi. Reuters mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, dan BPS menunjukkan struktur perdagangannya menempatkan Indonesia dalam simpul penting rantai pasok Asia, khususnya pada besi-baja, nikel, bahan bakar mineral, serta produk manufaktur. Dalam konteks persaingan global atas energi, mineral kritis, dan jalur laut, Indonesia tidak lagi bisa dilihat hanya sebagai "swing state" diplomatik, tetapi juga sebagai "swing economy" yang diperebutkan. ([Reuters](#))

Pentingnya Indonesia juga terletak pada posisinya sebagai negara ASEAN terbesar. AOIP menegaskan ASEAN harus menjadi "honest broker" di tengah competing interests dan menempatkan ASEAN Centrality sebagai prinsip dasar kerja sama Indo-Pasifik. Dokumen AOIP 2019 secara eksplisit menyebut Indo-Pasifik harus dipandang sebagai kawasan dialog dan kerja sama, bukan kawasan rivalitas, sementara deklarasi ASEAN 2024 menegaskan kembali ASEAN-Centred Regional Architecture, komitmen pada multilateralism, penghormatan pada UNCLOS, dan penolakan penggunaan kekuatan. Karena Indonesia adalah penggagas utama AOIP dan aktor terbesar di ASEAN, maka kualitas strategi luar negeri Indonesia akan sangat menentukan apakah ASEAN tetap menjadi subjek atau justru berubah menjadi objek rivalitas kekuatan besar. ([ASEAN](#))

Di samping itu, Kementerian Luar Negeri sendiri dalam dokumen kinerja 2025 menyebut keanggotaan penuh Indonesia di BRICS sejak 1 Januari 2025 sebagai keberhasilan strategis yang memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi dan politik global, memperluas akses pada

kerja sama dan pembiayaan pembangunan, serta meningkatkan peran Indonesia dalam mendorong reformasi tata kelola global yang lebih inklusif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melihat posisi Indonesia semata dari lensa kawasan, tetapi juga dari lensa sistemik: Indonesia hendak menempatkan diri sekaligus sebagai jangkar ASEAN dan sebagai suara Global South. ([kemlu.go.id](http://kemlu.go.id))

#### **4. Amerika Serikat: Pasar, Teknologi, dan Kalkulasi Geopolitik**

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pada 2025–2026 menunjukkan sisi pragmatis dari bebas-aktif. Pada Februari 2026, Indonesia dan AS menyelesaikan perjanjian dagang yang menurunkan tarif AS atas barang Indonesia menjadi 19% dari 32%, dengan lebih dari 1.800 komoditas Indonesia—termasuk sawit, kopi, dan kakao—dibebaskan dari tarif tersebut. Perjanjian itu juga mencakup penghapusan lebih dari 99% hambatan tarif Indonesia terhadap produk AS, komitmen impor barang dan jasa AS hingga USD 38,4 miliar, kerja sama pada mineral kritis, serta klausul yang menyentuh isu digital dan investasi. Secara ekonomi, ini membuka peluang besar; secara strategis, ini menunjukkan bahwa Indonesia bersedia bernegosiasi keras demi menjaga akses pasar dan arus investasi. ([Reuters](https://www.reuters.com))

Namun, hubungan dengan Amerika Serikat bukan hanya soal ekonomi. Ia juga menyangkut teknologi, keamanan, dan legitimasi. Dalam dunia di mana Washington menggunakan tarif, standar, dan akses pasar sebagai alat politik, kesepakatan dagang tidak pernah netral secara geopolitik. Klausul tentang mineral kritis dan perdagangan digital dalam perjanjian Februari 2026 menunjukkan bahwa AS melihat Indonesia bukan sekadar pemasok barang, tetapi bagian dari persaingan teknologi dan industrial yang lebih besar. Bagi Indonesia, manfaat jangka pendeknya jelas, tetapi risikonya juga nyata: ruang kebijakan nasional bisa menyempit jika ketentuan-ketentuan baru terlalu dalam memengaruhi industrial policy, divestment, atau pengaturan data digital. ([Reuters](https://www.reuters.com))

Akan tetapi, Indonesia tampaknya sadar akan risiko itu. Keterlibatan Indonesia dalam "Board of Peace" bentukan Trump terkait Gaza, misalnya, justru dibarengi kehati-hatian yang sangat jelas. Dokumen Setneg 5 Februari 2026 menekankan diplomasi realistis dan prinsip kehati-hatian Indonesia, termasuk opsi untuk keluar jika inisiatif itu bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional. Reuters pada 6 Maret 2026 kemudian melaporkan bahwa Prabowo siap menarik Indonesia dari Board of Peace jika tidak menguntungkan Palestina dan kepentingan Indonesia, sementara semua pembicaraan terkait penugasan tertunda akibat perang Iran. Pola ini menunjukkan satu hal: Indonesia bersedia aktif bersama AS, tetapi tidak mau menyerahkan hak veto atas kepentingannya sendiri. ([Setneg](#))

## **5. Tiongkok: Mitra Ekonomi Terbesar, Sekaligus Sumber Sensitivitas Strategis**

Bila Amerika Serikat penting untuk akses pasar dan teknologi, Tiongkok sangat penting untuk perdagangan, investasi, dan industrialisasi. BPS mencatat Tiongkok adalah pasar ekspor nonmigas terbesar Indonesia dan sumber impor nonmigas terbesar pada 2025, sementara Reuters menyebut Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Pada April 2025, Wang Yi mengatakan Tiongkok bersedia mengimpor lebih banyak produk Indonesia, dan pertemuan tingkat tinggi kedua negara juga menekankan pentingnya menjaga sistem perdagangan multilateral dan keadilan internasional. Dari perspektif ekonomi murni, kedekatan ini masuk akal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun kedekatan ekonomi dengan Tiongkok selalu dibayangi sensitivitas strategis, terutama di Laut Cina Selatan. Reuters pada November 2024 menegaskan bahwa Indonesia tidak mengakui klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan, dan Prabowo mengatakan Indonesia akan "selalu menjaga kedaulatan" sambil tetap memilih kemungkinan kemitraan. Ini adalah rumusan yang sangat khas Indonesia: keras pada

kedaulatan, lunak pada retorika hubungan. Rumusan ini tidak lahir dari ambiguitas, melainkan dari kesadaran bahwa Indonesia memerlukan hubungan baik dengan Tiongkok, tetapi tidak dapat mengorbankan hak berdaulat di ZEE-nya sendiri. ([Reuters](#))

Di sinilah kualitas bebas-aktif diuji. Indonesia tidak dapat sekadar menyatakan netral bila klaim maritim Tiongkok bersinggungan dengan kepentingan Indonesia di Natuna. Di sisi lain, Indonesia juga tidak akan efektif bila merespons semata dengan retorika konfrontatif. Karena itu, jalur yang dipilih ialah kombinasi antara penegasan hukum, penguatan kapasitas maritim, dukungan pada Code of Conduct ASEAN–Tiongkok, dan pemeliharaan hubungan ekonomi. Menlu Sugiono pada Januari 2025 menegaskan Indonesia akan memperluas kemitraan pertahanan, memperkuat keamanan maritim, dan terus mendorong penyelesaian Code of Conduct dengan Tiongkok sambil memprioritaskan sentralitas ASEAN. Inilah bentuk konkret dari strategi yang tidak menyerah pada rivalitas, tetapi juga tidak menutup mata pada ancaman. ([Reuters](#))

## **6. BRICS, Rusia, dan Politik Jejaring Global South**

Masuknya Indonesia ke BRICS sebagai anggota penuh pada 1 Januari 2025 adalah salah satu indikator paling jelas bahwa Indonesia sedang memperluas arsitektur jejaringnya di luar orbit Barat tradisional. Reuters melaporkan bahwa Brasil mengumumkan penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh, sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebut keanggotaan BRICS sebagai jalan strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan negara-negara berkembang. Brasil juga menyatakan Indonesia sejalan dengan agenda reformasi tata kelola global dan kerja sama Global South. Ini bukan pergeseran blok, melainkan perluasan panggung. ([Reuters](#))

Langkah itu diperkuat pada Maret 2025 ketika Prabowo menyatakan Indonesia akan bergabung dengan New Development Bank. Reuters mencatat Prabowo melihat keanggotaan NDB sebagai sarana untuk

mempercepat transformasi ekonomi Indonesia, sementara presiden NDB Dilma Rousseff menyebut peluang kerja sama pada energi terbarukan, biodiesel, dan pengembangan teknologi. Dengan BRICS dan NDB, Indonesia memperoleh dua hal sekaligus: ruang diplomatik untuk mendorong reformasi global, dan peluang pembiayaan pembangunan yang tidak sepenuhnya bergantung pada kanal Barat. ([Reuters](#))

Hubungan dengan Rusia memperlihatkan logika yang serupa. Reuters pada Juni 2025 melaporkan bahwa Prabowo bertemu Putin untuk memperdalam "strategic partnership," mencakup diskusi mengenai militer, keamanan, perdagangan, dan bahkan kemungkinan kerja sama nuklir sipil di kemudian hari. Pada Desember 2025, Reuters juga mencatat bahwa Prabowo tetap menegaskan politik luar negeri non-aligned dan tidak akan bergabung dengan blok militer. Karena itu, mendekati ke Rusia tidak otomatis berarti berbalik dari Barat. Yang lebih akurat adalah bahwa Indonesia sedang merawat prinsip diversifikasi strategis: membuka sebanyak mungkin pintu agar tidak terkurung oleh satu kanal. ([Reuters](#))

## **7. Uni Eropa: Diversifikasi Pasar dan Pertarungan Norma**

Jika BRICS dan Rusia memberi ruang Global South, maka Uni Eropa memberi ruang diversifikasi pasar dan penyeimbang terhadap ketergantungan berlebih pada Tiongkok atau Amerika Serikat. Reuters melaporkan bahwa pada Juli 2025 Indonesia dan Uni Eropa mencapai political agreement untuk memajukan CEPA, yang dinilai akan membuka peluang baru di sektor pertanian dan otomotif. Kesepakatan ini penting, bukan hanya karena nilai dagangnya, tetapi karena ia memperluas opsi Indonesia di tengah tekanan tarif dan perang dagang global. ([Reuters](#))

Namun hubungan dengan Eropa juga penuh gesekan, terutama pada sawit dan regulasi hijau. Reuters pada 7 Maret 2026 melaporkan bahwa Indonesia akan mengajukan permintaan *suspension of concessions* terhadap Uni Eropa di WTO karena menilai blok tersebut tidak mematuhi

putusan WTO dalam sengketa sawit. Di sini terlihat bahwa bebas-aktif tidak berarti selalu lunak. Indonesia bisa sangat kooperatif dalam CEPA, tetapi juga sangat tegas ketika merasa diperlakukan tidak adil dalam rezim perdagangan global. Inilah keseimbangan penting antara keterbukaan ekonomi dan ketegasan kedaulatan ekonomi. ([Reuters](#))

Secara strategis, relasi dengan Eropa mengajarkan bahwa rivalitas kekuatan besar bukan satu-satunya tantangan. Ada juga rivalitas norma: standar lingkungan, sertifikasi, dan aturan perdagangan dapat menjadi alat kekuasaan yang sama efektifnya dengan kapal perang. Karena itu, strategi bebas-aktif Indonesia harus mampu bergerak di dua level sekaligus: level geopolitik klasik dan level *regulatory geopolitics*. Indonesia tidak cukup hanya menjaga hubungan baik; ia juga harus punya kapasitas negosiasi hukum, standar, dan perdagangan yang kuat. ([Reuters](#))

## **8. ASEAN, AOIP, dan Sentralitas sebagai Strategi Bertahan**

Bagi Indonesia, ASEAN bukan sekadar forum regional, tetapi pelipat daya strategi. AOIP 2019 menegaskan ASEAN sebagai *honest broker* dalam lingkungan *strategic environment of competing interests*, dan menolak Indo-Pasifik didefinisikan sebagai arena rivalitas. Dokumen itu menekankan ASEAN Centrality, keterbukaan, inklusivitas, penghormatan pada hukum internasional, UNCLOS, penyelesaian sengketa secara damai, dan penguatan mekanisme ASEAN-led seperti EAS, ARF, ADMM-Plus, serta EAMF. Singkatnya, AOIP adalah jawaban normatif ASEAN terhadap persaingan blok. ([ASEAN](#))

Deklarasi ASEAN 2024 kemudian memperbarui dan memperkuat mandat itu dengan menegaskan kembali komitmen pada regionalism, multilateralism, ASEAN-centred regional architecture, penghormatan pada UNCLOS, dan penyelesaian sengketa tanpa ancaman atau penggunaan kekuatan. ASEAN juga menekankan pentingnya mempertahankan mekanisme ASEAN-led agar pergeseran geopolitik

dan geostrategik tidak merusak perdamaian dan stabilitas kawasan. Ini menunjukkan bahwa sentralitas ASEAN bukan slogan, melainkan strategi institusional untuk mencegah Asia Tenggara menjadi sekadar papan permainan kekuatan besar. ([ASEAN](#))

Bagi Indonesia, sentralitas ASEAN punya tiga fungsi. Pertama, fungsi penahan: mencegah negara-negara ASEAN tercerai-berai ke orbit kekuatan besar yang berbeda-beda. Kedua, fungsi kanal: menyediakan wadah perundingan bagi isu sensitif seperti Laut Cina Selatan. Ketiga, fungsi legitimasi: memberi Indonesia dasar normatif untuk berbicara bukan hanya atas nama dirinya sendiri, tetapi sebagai bagian dari arsitektur kawasan. Karena itu, ketika Menlu Sugiono pada Januari 2025 menekankan penyelesaian Code of Conduct dan sentralitas ASEAN, ia sesungguhnya sedang menegaskan bahwa Indonesia tidak mau merespons rivalitas hanya secara bilateral, tetapi melalui penguatan tatanan regional. ([Reuters](#))

## **9. Laut Cina Selatan, Natuna, dan Kebutuhan Menjaga Batas**

Persoalan Laut Cina Selatan memperlihatkan dengan tajam bahwa bebas-aktif bukan kebijakan tanpa garis merah. Reuters pada Januari 2026 mengingatkan bahwa klaim maritim luas Tiongkok tumpang tindih dengan ZEE Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, sehingga Code of Conduct yang fungsional menjadi penting untuk mencegah eskalasi. Dalam konteks Indonesia, isu ini terutama menyentuh Natuna Utara dan hak berdaulat atas sumber daya di ZEE. Karena itu, Indonesia tidak bisa memperlakukan sengketa ini sekadar sebagai isu hubungan baik dengan Beijing. ([Reuters](#))

Pernyataan Prabowo pada November 2024 memberi gambaran mengenai pola Indonesia: "kami menghormati semua kekuatan," tetapi "kami akan selalu menjaga kedaulatan." Rumusan ini mengandung dua pesan sekaligus. Ke luar, Indonesia menunjukkan bahwa ia tidak memusuhi Tiongkok secara ideologis. Ke dalam, Indonesia menegaskan

bahwa kerja sama ekonomi tidak akan dibayar dengan kompromi atas kedaulatan. Strategi seperti ini cocok bagi negara menengah: tidak memancing eskalasi, tetapi juga tidak memberi sinyal kelemahan.

[\(Reuters\)](#)

Namun rumusan normatif saja tidak cukup. Menjaga kedaulatan memerlukan kemampuan maritim, kerja sama informasi, penguatan domain awareness, serta kesiapan diplomasi hukum. Karena itu, intensifikasi kemitraan pertahanan yang diumumkan Sugiono pada Januari 2025 sebaiknya dibaca bukan sebagai penyimpangan dari bebas-aktif, melainkan bagian dari syarat keberhasilannya. Negara yang ingin nonblok tetapi lemah secara kapasitas justru akan lebih mudah ditekan. Bebas-aktif yang kredibel memerlukan fondasi pertahanan minimum yang membuat Indonesia dihormati tanpa harus menjadi anggota blok.

[\(Reuters\)](#)

## **10. Keamanan dan Minilateralisme: Sejauh Mana Indonesia Boleh Dekat?**

Tanda paling mutakhir dari fleksibilitas strategis Indonesia muncul dalam hubungan pertahanannya dengan Australia. Reuters melaporkan bahwa pada 6 Februari 2026 Indonesia dan Australia menandatangani pakta keamanan yang mengharuskan kedua pihak saling berkonsultasi jika salah satu menghadapi ancaman. Lalu pada 12 Maret 2026, Menteri Pertahanan Indonesia menyatakan Jakarta dan Canberra berencana memperluas kerja sama keamanan dengan melibatkan Jepang dan Papua Nugini, termasuk pengaturan trilateral dan penguatan berbagi intelijen. Ini adalah perkembangan penting karena menunjukkan Indonesia semakin nyaman dengan format minilateral yang selektif.

[\(Reuters\)](#)

Apakah ini bertentangan dengan bebas-aktif? Tidak selalu. Kuncinya terletak pada sifat dan batas kerja sama tersebut. Selama Indonesia tidak masuk ke dalam aliansi pertahanan yang mengikat secara ofensif dan

tetap mempertahankan kontrol penuh atas keputusan penggunaan kekuatan, maka kerja sama keamanan seperti ini justru dapat dipahami sebagai *capacity-enhancing partnerships*. Dalam dunia di mana ancaman maritim, siber, dan logistik makin kompleks, menolak semua bentuk kerja sama keamanan justru akan melemahkan Indonesia sendiri.

[\(Reuters\)](#)

Akan tetapi, ada garis yang harus dijaga. Minilateralisme keamanan mudah sekali dipersepsi pihak lain sebagai bagian dari arsitektur penyeimbangan terhadap Tiongkok. Karena itu, Indonesia harus sangat hati-hati memastikan bahwa setiap kerja sama pertahanan dibingkai dalam bahasa keamanan maritim, konsultasi, dan stabilitas kawasan, bukan containment. Di sinilah diplomasi menjadi pelengkap pertahanan: setiap penguatan kapasitas harus diimbangi komunikasi strategis yang konsisten tentang tujuan defensif dan independensi kebijakan Indonesia.

[\(Reuters\)](#)

## **11. Geoekonomi: Ketahanan Domestik sebagai Syarat Bebas-Aktif**

Tidak ada politik luar negeri yang benar-benar bebas bila ekonomi domestiknya rapuh. Reuters melaporkan bahwa FDI Indonesia pada 2025 hanya tumbuh 0,1% menjadi 900,9 triliun rupiah, jauh melambat dari pertumbuhan 21% pada 2024. Pada saat yang sama, pasar mulai sensitif terhadap isu kredibilitas fiskal dan arah kebijakan ekonomi. Ini berarti strategi bebas-aktif Indonesia tidak dapat hanya bertumpu pada kelincahan diplomatik; ia harus ditopang oleh kemampuan menjaga iklim investasi, memperkuat hilirisasi, dan memastikan bahwa diversifikasi mitra benar-benar menghasilkan kapasitas nasional, bukan sekadar ketergantungan baru dengan wajah berbeda. [\(Reuters\)](#)

Perang Iran–AS–Israel pada Maret 2026 memperlihatkan betapa cepat gejolak eksternal dapat mengguncang ruang kebijakan Indonesia. Reuters melaporkan pemerintah harus menahan kejutan kenaikan harga minyak melalui APBN, dengan anggaran subsidi energi 2026 sebesar

381,3 triliun rupiah, sementara harga minyak menembus lebih dari USD 100 per barel dan rupiah menyentuh rekor terlemah 16.990 per dolar. Reuters juga melaporkan mayoritas ekonom memperkirakan BI menahan suku bunga pada 4,75% karena perang Timur Tengah menekan rupiah dan membatasi ruang pelonggaran. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia multipolar, kebebasan diplomatik tidak akan banyak berarti bila ketahanan energi, fiskal, dan moneter Indonesia tidak diperkuat.

(Reuters)

Dari sini terlihat hubungan erat antara geopolitik dan pembangunan nasional. Ketika Indonesia bernegosiasi dengan AS tentang tarif dan mineral kritis, berbicara dengan Tiongkok tentang perdagangan dan investasi, memperluas kanal dengan BRICS, atau mempercepat CEPA dengan Eropa, yang sedang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya posisi luar negeri, tetapi struktur ekonomi jangka panjang Indonesia. Bebas-aktif yang berhasil adalah bebas-aktif yang memperbesar *national bargaining power* karena fondasi ekonominya makin kuat, bukan sebaliknya. (Reuters)

## 12. Risiko-Risiko Strategi Bebas-Aktif dalam Praktik

Meski tampak menjanjikan, strategi bebas-aktif dalam dunia multipolar mengandung beberapa risiko. Risiko pertama adalah *strategic overstretch*: terlalu banyak membuka front hubungan tanpa prioritas yang jelas. Bila Indonesia bergerak serempak ke BRICS, AS, Eropa, Rusia, Australia, dan berbagai forum lain tanpa penyelarasan yang kuat antar-kementerian, hasilnya bisa berupa kebijakan yang tampak aktif tetapi tidak selalu saling menguatkan. Bukti paling mudah terlihat dari kenyataan bahwa beberapa kanal Indonesia sangat produktif secara politik, tetapi manfaat ekonominya belum selalu seimbang atau langsung terasa. (Reuters)

Risiko kedua adalah persepsi eksternal. Di mata satu pihak, fleksibilitas Indonesia bisa dibaca sebagai kebijaksanaan; di mata pihak lain, ia bisa

dibaca sebagai ambiguitas. Jika Indonesia terlalu dekat ke satu kubu dalam isu tertentu tanpa penjelasan publik yang kuat, maka kredibilitas bebas-aktif bisa tergerus. Isu Board of Peace memberi pelajaran penting: partisipasi aktif pada inisiatif yang dipimpin AS memicu kritik domestik dan eksternal, sehingga pemerintah harus menegaskan garis merah kepentingan nasional dan kemungkinan keluar. Ini menunjukkan bahwa bebas-aktif memerlukan *strategic communication* yang baik, bukan hanya manuver diplomatik. ([Setneg](#))

Risiko ketiga adalah ketimpangan kapasitas. Dunia multipolar menuntut negara menengah untuk cekatan pada isu perdagangan digital, mineral kritis, perubahan iklim, standar industri, pertahanan maritim, dan keuangan pembangunan sekaligus. Jika kapasitas birokrasi, koordinasi antarlembaga, dan perencanaan strategis tertinggal, maka Indonesia akan reaktif, bukan proaktif. Dalam situasi seperti itu, bebas-aktif bisa jatuh menjadi slogan yang indah tetapi rapuh. Karena itu, keberhasilan strategi ini bergantung bukan hanya pada presiden atau menteri luar negeri, tetapi pada kualitas keseluruhan mesin negara. ([kemlu.go.id](#))

### **13. Agenda Strategis: Bagaimana Bebas-Aktif Harus Dioperasionalkan**

Pertama, Indonesia perlu menegaskan bahwa bebas-aktif abad ke-21 bertumpu pada diversifikasi, bukan *equidistance*. Ukuran keberhasilan bukan apakah Indonesia terlihat berjarak sama dari semua pihak, melainkan apakah Indonesia punya cukup banyak opsi untuk tidak didikte oleh siapa pun. Karena itu, hubungan dengan AS, Tiongkok, Eropa, BRICS, Rusia, Jepang, Australia, Timur Tengah, dan Afrika perlu dikelola sebagai portofolio strategis yang saling melengkapi. Ini sudah mulai dilakukan, tetapi perlu dikonsolidasikan menjadi *grand strategy* yang lebih eksplisit. ([Reuters](#))

Kedua, Indonesia harus menempatkan ASEAN sebagai panggung kekuatan, bukan sekadar ruang diplomasi protokoler. AOIP memberi

fondasi normatif yang baik: Indo-Pasifik sebagai ruang dialog, bukan rivalitas; sentralitas ASEAN; penghormatan pada hukum internasional; dan penguatan mekanisme ASEAN-led. Tetapi semua itu hanya akan efektif jika Indonesia konsisten menginvestasikan modal politik pada ASEAN, termasuk mendorong penyelesaian Code of Conduct Laut Cina Selatan, memperkuat konektivitas, dan menjaga agar ASEAN tidak terbelah tajam oleh rivalitas AS–Tiongkok. ([ASEAN](#))

Ketiga, Indonesia harus membangun ketahanan geoekonomi domestik sebagai fondasi diplomasi. Diversifikasi pasar ekspor, penguatan industri bernilai tambah, pengembangan energi terbarukan dan biodiesel, pengamanan pasokan energi, serta pendalaman pasar keuangan domestik akan memperbesar kemampuan Indonesia bertahan saat gejolak global datang. Ketika perang Timur Tengah segera menekan rupiah, subsidi, dan suku bunga, pelajarannya jelas: kedaulatan kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh kedaulatan energi dan kesehatan fiskal. ([Reuters](#))

Keempat, Indonesia perlu melanjutkan kerja sama keamanan yang selektif dan defensif, tetapi dengan pagar normatif yang jelas. Pakta dengan Australia dan rencana perluasan kerja sama dengan Jepang serta Papua Nugini dapat membantu kapasitas maritim dan pertukaran intelijen. Namun Indonesia harus terus menegaskan bahwa kerja sama ini tidak identik dengan masuk blok militer. Selama prinsip itu dijaga, kerja sama pertahanan justru dapat menjadi alat untuk memperkuat otonomi, bukan mengikisnya. ([Reuters](#))

Kelima, Indonesia perlu memperkuat diplomasi isu-isu baru: digital governance, critical minerals, transisi energi, dan regulasi perdagangan hijau. Perjanjian dengan AS pada Februari 2026 menunjukkan betapa isu digital dan mineral kritis kini sudah menjadi bagian dari rivalitas kekuatan besar. Sengketa sawit dengan UE menunjukkan bahwa standar lingkungan dapat berfungsi sebagai instrumen kekuasaan. Dengan

demikian, bebas-aktif masa kini harus dioperasikan tidak hanya oleh diplomat politik, tetapi juga oleh negosiator perdagangan, regulator digital, perancang industri, dan pembuat kebijakan energi. ([Reuters](#))

## **Kesimpulan**

Indonesia di tengah rivalitas kekuatan besar tidak berada pada posisi untuk menang dengan cara berhadap-hadapan. Kekuatan Indonesia justru terletak pada kemampuannya menjaga ruang gerak, mengelola banyak hubungan sekaligus, dan mengubah posisinya sebagai negara menengah besar menjadi sumber daya tawar. Dalam dunia multipolar, strategi bebas-aktif tetap relevan, tetapi tidak boleh ditafsirkan sebagai netralitas pasif. Ia harus menjadi strategi otonomi strategis: nonblok secara prinsip, aktif secara diplomatik, pragmatis secara ekonomi, hati-hati secara keamanan, dan konsisten pada hukum internasional. ([Setneg](#))

Perilaku Indonesia sepanjang 2025–2026 menunjukkan arah itu sudah mulai terbentuk. Indonesia masuk BRICS, bergabung dengan NDB, memperkuat kanal dengan AS, menjaga kedekatan dengan Tiongkok, memajukan CEPA dengan UE, memperluas hubungan dengan Rusia, memperkuat kemitraan keamanan dengan Australia, dan tetap menegaskan sentralitas ASEAN serta non-blok. Semua itu menandakan bukan kebingungan, melainkan adaptasi. Tantangannya kini adalah memastikan bahwa adaptasi itu ditopang prioritas yang jelas, kapasitas negara yang kuat, dan komunikasi strategis yang konsisten. Bila itu berhasil, bebas-aktif bukan hanya akan bertahan; ia justru dapat menjadi model paling realistis bagi negara menengah dalam dunia multipolar yang penuh ketidakpastian. ([Reuters](#))

Berikut **glosarium** dan **daftar pustaka gaya APA 7** yang dapat langsung ditempelkan pada bagian akhir makalah.

## **Glosarium**

### **Bebas-aktif**

Prinsip politik luar negeri Indonesia yang menolak keterikatan pada blok kekuatan tertentu, tetapi tetap aktif membangun kerja sama, perdamaian, dan solusi diplomatik. ([Setneg](#))

### **Dunia multipolar**

Tatanan internasional yang ditandai oleh hadirnya beberapa pusat kekuatan sekaligus, sehingga negara-negara menengah seperti Indonesia harus mengelola hubungan dengan banyak aktor besar secara bersamaan. Dalam konteks mutakhir, hal ini tampak dari keterlibatan Indonesia dengan AS, Tiongkok, BRICS, Uni Eropa, dan ASEAN secara paralel. ([Reuters](#))

### **Otonomi strategis**

Kemampuan suatu negara untuk menjaga kebebasan mengambil keputusan luar negeri dan keamanan tanpa didikte kekuatan besar, dengan cara memperluas opsi kemitraan, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kapasitas nasional. Ini merupakan pembacaan operasional atas praktik bebas-aktif Indonesia saat ini. ([Setneg](#))

### **Sentralitas ASEAN**

Gagasan bahwa ASEAN dan mekanisme yang dipimpinnya harus tetap menjadi poros arsitektur kawasan, termasuk di Indo-Pasifik, agar Asia Tenggara tidak hanya menjadi objek rivalitas kekuatan besar. ([ASEAN](#))

### **ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)**

Dokumen strategis ASEAN yang menekankan inklusivitas, dialog, kerja sama, penghormatan pada hukum internasional, dan ASEAN Centrality dalam kawasan Indo-Pasifik. ([ASEAN](#))

### **Minilateralisme**

Kerja sama dalam format terbatas yang melibatkan beberapa negara saja, biasanya untuk tujuan yang lebih praktis dan cepat, misalnya kerja sama keamanan Indonesia–Australia yang hendak diperluas dengan Jepang dan Papua Nugini. ([Reuters](#))

### **Code of Conduct di Laut Cina Selatan**

Kerangka aturan perilaku yang terus dinegosiasikan ASEAN dan Tiongkok untuk mencegah eskalasi dan mengelola sengketa di Laut Cina Selatan secara damai. ([Reuters](#))

### **Kedaulatan maritim**

Kemampuan negara menjaga hak berdaulat, keamanan laut, dan yurisdiksi di wilayah maritimnya. Dalam kasus Indonesia, isu ini sangat terkait dengan Natuna dan Laut Cina Selatan. ([Reuters](#))

### **Geoekonomi**

Penggunaan instrumen ekonomi—perdagangan, investasi, tarif, mineral kritis, pembiayaan, dan standar regulasi—sebagai alat kekuatan dalam persaingan internasional. ([Reuters](#))

### **Diversifikasi strategis**

Upaya memperluas mitra dagang, investasi, pembiayaan, dan keamanan agar ketergantungan pada satu negara atau satu blok dapat dikurangi. Strategi ini terlihat dari langkah Indonesia yang aktif di BRICS, AS, UE, ASEAN, dan kemitraan keamanan regional sekaligus. ([Reuters](#))

### **Mineral kritis**

Bahan tambang strategis yang penting bagi industri teknologi, energi, dan manufaktur masa depan. Dalam perjanjian dagang Indonesia–AS, isu ini menjadi salah satu komponen penting. ([Reuters](#))

### **Global South**

Kelompok luas negara-negara berkembang yang mendorong tatanan internasional lebih inklusif, lebih adil, dan tidak didominasi sepenuhnya

oleh kekuatan Barat tradisional. Keanggotaan Indonesia di BRICS sering dibaca dalam kerangka ini. ([Reuters](#))

### **Ketahanan geoekonomi**

Kemampuan negara menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah guncangan eksternal seperti perang, tarif, gangguan rantai pasok, atau lonjakan harga energi. Bagi Indonesia, ini berkaitan dengan perdagangan, investasi, inflasi, dan ketahanan fiskal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

### **Non-blok**

Sikap tidak bergabung ke blok kekuatan atau aliansi militer tertentu, tetapi tetap menjalin kerja sama luas berdasarkan kepentingan nasional. Presiden Prabowo menegaskan garis ini dalam penjelasan resmi pemerintah pada Maret 2026. ([Setneg](#))

### **Daftar Pustaka (APA 7)**

Daftar pustaka berikut disusun dari sumber resmi pemerintah Indonesia, ASEAN, Bank Indonesia, BPS, dan laporan Reuters yang dipakai dalam esai. ([Setneg](#))

Association of Southeast Asian Nations. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.

Association of Southeast Asian Nations. (2024, October 9). *ASEAN Leaders' Declaration on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific for the future-ready ASEAN and ASEAN-centred regional architecture*.

Badan Pusat Statistik. (2025, December 1). *Kinerja positif neraca perdagangan Indonesia masih berlanjut*.

*Rudy C Tarumingkeng: Indonesia di Tengah Rivalitas Kekuatan Besar:  
Strategi Bebas-Aktif dalam Dunia Multipolar*

Bank Indonesia. (2025, October 23). *BI-Rate held at 4.75 percent: Strengthening economic growth, maintaining stability.*

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2026). *Laporan kinerja Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup tahun 2025.*

Reuters. (2024, November 14). *Indonesian president says he will safeguard sovereignty in South China Sea.*

Reuters. (2025, January 6). *Indonesia joins BRICS bloc as full member, Brazil says.*

Reuters. (2025, January 10). *Indonesia to intensify defence partnerships and maritime security, top diplomat says.*

Reuters. (2025, March 25). *Indonesia to join BRICS' New Development Bank, president says.*

Reuters. (2025, July 13). *EU, Indonesia strike political agreement to advance free trade deal.*

Reuters. (2026, February 6). *Indonesia signs security treaty with Australia, Prabowo says.*

Reuters. (2026, February 20). *Key points of the Indonesia-U.S. trade agreement.*

Reuters. (2026, March 12). *Indonesia and Australia to expand security cooperation to include Japan, Papua New Guinea.*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026, March 9). *Indonesia teguhkan politik luar negeri bebas aktif di tengah ketegangan global.*

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 12 Maret 2026  
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#) )

<https://chatgpt.com/c/69aa40dd-9010-83a1-80e1-865dbf258862>